

## Dialektika agama dalam komunikasi politik menjelang Pilpres tahun 2024

### *Dialectics Of Religion In Political Communication Ahead Of The 2024 Presidential Election*

**Teddy Khumaedi**

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

[teddy.khumaedi@iuqibogor.ac.id](mailto:teddy.khumaedi@iuqibogor.ac.id)

#### ABSTRAK

Agama adalah pedoman yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Agama merupakan pedoman bagi penganutnya dalam segala perilaku mereka. Sebagai sumber nilai dan etika, agama menuntut para pemeluknya untuk mengikuti semua nilai-nilai tersebut sebagai bentuk ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa perubahan situasi politik secara historis sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan umat Islam, baik dari segi pemikiran maupun gerakan social. Hal ini menyiratkan bahwa semua hasil pemikiran tersebut tidak lepas dari nilai-nilai. Islam memiliki pandangan holistik yang memberikan prinsip-prinsip dasar untuk menangani berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk membangun hubungan dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan Tuhan. Dengan istilah lain, Islam dapat dianggap sebagai kerangka ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan aspek lainnya. Studi ini tidak hanya memanfaatkan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi lapangan (*field research*), tetapi juga melibatkan wawancara kelompok atau diskusi kelompok (*FGD*) terfokus. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam yang dianggap masih kurang dalam analisis dan kesimpulan yang dibuat. Tujuan penelitian ini ialah untuk menunjukkan bahwa baik konsep eksklusif maupun inklusif merupakan cara untuk menanggapi realitas agama dalam konteks komunikasi politik. Pengaruhnya terhadap perubahan preferensi terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak dapat diabaikan, namun perlu dipahami secara berimbang. Fenomena dialektika agama dalam komunikasi politik, terutama menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, menjadi inti dari fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mengapa fenomena dialektika agama selalu menjadi bagian dari komunikasi politik menjelang setiap pemilihan presiden.

Kata kunci: *Agama, Komunikasi Politik, Perubahan, Pilpres*

#### ABSTRACT

*Religion serves as a guide given by God to humanity to achieve happiness in life. It provides guidance for its followers in all aspects of their behavior. As a source of values and ethics, religion demands its adherents to adhere to all these values as a form of worship. This research aims to assert that historical political changes are significantly influenced by the dynamics of Islamic development, both in terms of thought and social movements. This implies that all resulting thoughts are inseparable from values. Islam offers a holistic perspective that provides basic principles to address various aspects of human life, including building relationships with oneself, others, the environment, and God. In other words, Islam can be considered a framework that regulates all aspects of human life, including economic, social, political, cultural, and other aspects. Every interpretation of religion must be part of the community's legal preferences. The study not only utilizes in-depth interviews and field research, but also involves focused group interviews or group discussions (FGDs). This approach aims to obtain*

*more in-depth information that is considered to be lacking in the analysis and conclusions made. The purpose of this research is to demonstrate that both exclusive and inclusive concepts are ways to respond to the reality of religion in the context of political communication. Its influence on changes in preferences for presidential and vice-presidential candidates cannot be ignored but should be understood in a balanced manner. The phenomenon of the dialectic of religion in political communication, especially leading up to the 2024 presidential and vice-presidential elections, is the core focus of this research. This research aims to uncover why the phenomenon of the dialectic of religion always becomes part of political communication before each presidential election.*

Keyword: *Religion, Political communication, Change,*

## PENDAHULUAN

Penelitian tentang dialektika agama dalam konteks komunikasi politik telah menjadi perhatian yang berkelanjutan sepanjang sejarah manusia di seluruh dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia. Dinamika tersebut semakin terlihat dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan kolonial dan tanggapan terhadap modernitas. Karena konsekuensi dari perjuangan tersebut tidak hanya mencakup kemerdekaan secara geografis, tetapi juga kemandirian secara hukum (Ebrahim Moosa, 2009:152). Penelitian ini mengonfirmasi secara historis bahwa perubahan politik erat kaitannya dengan konteks perkembangan dinamika umat Islam, baik dari segi pemikiran maupun gerakan social. (John L. Esposito, 1998:29-32). Akibatnya, semua gagasan tersebut kehilangan kebebasan nilainya. (Bryan S. Turnen, 2011:149) Contohnya, pemerintah, dengan kekuasaannya, berusaha melindungi segala kegiatan yang dapat mengancam otoritasnya. Sebagai hasilnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk terus menjaga melalui alat-alat kekuasaan politiknya.

Penelitian relevan yang memiliki kemiripan dengan kajian ini adalah: *Pertama*, dilakukan oleh Ilah Holilah mahasiswi doktoral UIN Jakarta, yang berjudul “*Agama, Komunikasi Politik dan Elektabilitas*”. Dalam penelitiannya ia menegaskan bahwa dirinya tidak menggunakan istilah politisasi agama walaupun agama dimanfaatkan untuk tujuan kampanye politik. Semata-mata karena istilah tersebut telah mengalami stigma buruk. Namun dia juga menghindari pemakaian istilah sakralisasi politik (*sacralization of politics*) sebagaimana di Barat karena istilah tersebut kurang akrab dengan pemahaman di Indonesia. Dalam konteks hubungan agama politik. Penulis tersebut lebih memilih sikap netral tergantung dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.

*Kedua*. Penelitian Wahab Nur Kadri Mahasiswa Program Magister Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul “*Dialektika Komunikasi pada Debat Pilpres 2019 dalam Perspektif Al-Qur’an*” dalam penelitiannya ia menguraikan Dialektika Komunikasi pada makna Debat Capres 2019 melalui konsep Jadal al-Qur’an, ternyata lebih memudahkan dalam

memverifikasi dan menjelaskan, baik perbedaan maupun persamaannya. Debat yang dilakukan Capres (Jokowi-Ma'ruf Amin) dengan Prabowo- Sandiaga Uno ternyata hanya konsep yang dikonstruksi manusia karena munculnya intersubjektivitas di antar dua pihak yang berkomunikasi atau berinteraksi mengenai persoalan tertentu, dalam hal ini politik dan kebangsaan. Karena itu, pengertian atau konsep Jadal jauh memiliki memiliki landasan historis dan filosofis yang sangat, yang berimplikasi pada dampak kuat bagi kemaslahatan umat manusia. Jadal, sebagai konsep yang sangat lengkap dalam memecahkan persoalan manusia, disamping manusia sebagai makhluk yang thabi'iyah, juga rasional dan emosional sekaligus. Sehingga dengan Jadal manusia lebih mudah dapat diarahkan untuk mencapai tujuan komunikasi yang dialektis dan dialogis, lebih mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, membina manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

*Ketiga.* Penelitian Hamdan. Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyriyah Mandar. Yang berjudul "*Dialektika Wacana Islam Dan Politik*". Dalam penelitian dia menyatakan bahwa uraian yang singkat tentang wacana Islam dan politik di atas, dapat dikategorikan sebagai berikut. *Pertama.* Islam merupakan agama yang memiliki kompleksitas tuntunan bagi penganutnya dalam menjalani dan mengelola hidup mereka, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Disinilah politik memperoleh ruang untuk dapat berkembang secara dinamis di berbagai konteks. *Kedua.* Islam memperkenalkan bentuk negara dengan empat sistem pemerintahan yakni; (1) sistem teokrasi, (2) sistem teo-demokrasi, (3) sistem monarki, dan (4) sistem imamah. *Ketiga.* Dalam konteks hubungan Islam dengan Negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, pemikir-pemikir Islam terbagi ke dalam tiga arus pemikiran; yakni kelompok Islamis Murni, Kelompok sekuler, dan kelompok penengah

Tentu saja, Islam sebagai "jalan hidup" memiliki prinsip-prinsip yang memandu para pengikutnya untuk menjalani kehidupan dengan baik, baik dalam konteks individual maupun sosial. Setiap Muslim secara pribadi perlu memiliki panduan untuk menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan kehidupannya. Islam menyediakan perspektif holistik yang memberikan prinsip-prinsip dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia, termasuk dalam membangun hubungan dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan Tuhan. Dengan kata lain, Islam dapat dianggap sebagai kerangka ajaran yang mengatur semua bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan aspek lainnya. (Hamdan, 2017: Vol.2 N0.1). Setiap interpretasi agama harus diintegrasikan ke dalam preferensi hukum masyarakat agar dapat memperkuat otoritas kekuasaannya. Dalam satu dekade terakhir di Indonesia, dinamika hubungan antara agama dan komunikasi politik telah tercermin melalui survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Sebagai contoh, hasil survei nasional pada bulan Maret 2021 yang dirilis oleh Indikator Politik menunjukkan bahwa sebanyak 62% dari generasi

muda Muslim tidak mengalami keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah di sekitar lingkungannya. Selanjutnya, sebanyak 65% juga tidak keberatan jika non-Muslim mengadakan acara keagamaan di sekitarnya. Namun, tanggapan mereka terhadap isu politik berbeda. Sebagai contoh, 39% dari mereka tidak setuju dengan orang non-Muslim menjabat sebagai presiden.

Pada sisi lain, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan September 2019 menunjukkan bahwa sekitar 53,0% umat Islam umumnya tidak setuju jika non-Muslim membangun rumah ibadah di sekitar lingkungannya. Lebih lanjut disebutkan bahwa sekitar 59,1% umat Islam tidak setuju dengan kemungkinan orang non-Muslim menjadi presiden. Sebaliknya, sekitar 71,0% non-Muslim tidak memiliki keberatan jika orang Islam menjabat sebagai presiden. (Burhanuddin Muhtadi, <https://surveyindikator.co.id/2021>). Di bidang lain, mayoritas sering mendominasi minoritas dalam layanan publik. Setidaknya 67,4% orang Islam setuju bahwa pemerintah seharusnya memberikan prioritas kepada pemeluk agama mayoritas dalam pengambilan keputusan berbangsa, bernegara, dan beragama. ([www.lsi.or.id/riset/447/rilis-survey-lsi-03-november-2019](http://www.lsi.or.id/riset/447/rilis-survey-lsi-03-november-2019)).

Data survei tersebut juga memperkuat fakta bahwa terdapat ketegangan yang berkelanjutan antara peran agama dalam komunikasi politik. Di satu sisi, ada yang mengambil pendekatan substansialistik, tanpa memperhatikan aspek-aspek retorik dan simbol keagamaan. Namun, di sisi lain, ada yang mengambil pendekatan formalistik dengan menekankan kepentingan formalisme keagamaan secara subyektif. (Din Syamsuddin, 2001:152) Inilah realitas yang sangat memengaruhi praktik dan metode para ahli hukum Islam dalam merumuskan implementasi ajaran Islam. (Ngainun Naim dan Qomarul Huda, *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 2021) Terutama yang paling signifikan yaitu pada pengaruhnya dalam persoalan politik dan hukum. (Athoillah Islamy, *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 2019). Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa agama pada hakikatnya membawa semangat pembebasan, yang sering disebut sebagai teologi pembebasan (*liberation theology*). Baginya, agama adalah doktrin yang berjuang untuk membebaskan kelompok yang tertindas dari penindasan, serta memberi mereka kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki jaminan keselamatan, baik dari ajaran agama maupun konstitusi negara, agar mereka bisa bebas menentukan pilihan hidupnya. (Asghar Ali Engineer, 1999:1-2)

Banyak akademisi telah melakukan berbagai studi tentang keterkaitan antara perilaku agama dan komunikasi politik. Sebagai contoh, Sunaryo menggambarkan bagaimana agama memengaruhi evolusi demokrasi dan keadilan. (Sunaryo, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. 2020). Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni menjelaskan hubungan yang harmonis antara agama dan negara, yang diwujudkan dalam bentuk hukum positif yang selalu mengakar pada prinsip ketuhanan yang maha esa. (Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.2019). Kehadiran kalimat "ketuhanan yang maha esa" juga berdampak pada pengakuan negara terhadap agama dan perlindungan hak untuk

menjalankan keyakinan sesuai dengan ajaran agama tersebut. (Ahmad Sadzali, *Jurnal Hukum*.2020). Pengaruh politik praktis yang diteliti oleh Muhamad Ridwan Effendi dan Iqbal Syafrudin tergambar dalam studi yang lebih praktis, menunjukkan bahwa pengaruh tersebut berhasil memperkuat identitas agama dengan sangat kuat. (Muhammad Ridwan Effendi dan Iqbal Syafrudin, *Jurnal Ilmiah Minbar Demokrasi*.2020) Sudirman juga mengilustrasikan pengaruh serupa terhadap interaksi yang dinamis antara agama dan negara akibat munculnya pemimpin politik. (Sudirman, *SCHOLASTICA:Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.2020).

Namun, ada kekosongan yang perlu diisi terkait kecenderungan dalam interaksi antara agama dan komunikasi politik dalam pembentukan hukum Islam. Inilah yang akan menjadi sumbangan dari proyek penelitian ini. Secara umum, model pemikiran eksklusif dan inklusif sering kali disangkutpautkan dengan pengaruh teologis dari agama lain, tetapi seringkali mengabaikan konteks sosial politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep eksklusif dan inklusif adalah respon terhadap realitas agama dalam komunikasi politik. Dampaknya terhadap perubahan preferensi terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak dapat dianggap sebagai penghapusan satu sama lain, melainkan harus dipahami secara dinamis. Konsep dialektika, seperti yang didefinisikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, mencakup penggunaan bahasa dan penalaran dialogis sebagai metode untuk mengeksplorasi masalah tertentu.

Asal-usul dialektika (dialektik) berhubungan dengan konsep dialog, yang mengimplikasikan komunikasi timbal balik. Istilah ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, ketika pemahaman bahwa segala sesuatu selalu berubah (*panta rei*) diperkenalkan. (<https://kbbi.web.id/dialektika>). Dalam pemikiran Hegel, ia menyatakan bahwa segala fenomena dalam alam semesta berasal dari konflik antara dua entitas yang menghasilkan entitas baru. Hegel kemudian mengembangkan dan menyederhanakan konsep dialektika dengan menginterpretasikannya sebagai trilogi: tesis, antitesis, dan sintesis. Dialektika Hegel merujuk pada suatu metode argumen dialektis khusus yang digunakan oleh filsuf Jerman pada abad ke-19. Proses dialektika ini merupakan cara bagi Hegel untuk berdebat melawan definisi atau pandangan yang sebelumnya dianggap kurang maju, menuju pada pemahaman yang lebih maju.

Dialektika" adalah istilah yang merujuk pada metode argumen filosofis yang melibatkan suatu proses kontradiktif antara pihak-pihak yang berlawanan. Georg Wilhelm Friedrich Hegel terkenal sebagai seorang filsuf yang mengadopsi dialektika sebagai metode filosofisnya. Baginya, dialektika adalah proses di mana dua hal yang bertentangan kemudian disatukan, dikenal dengan istilah tesis (pengakuan), antitesis (penolakan), dan sintesis (penyatuan kontradiksi). Pengertian yang diterima (pengakuan) harus didasarkan pada konsep empiris yang dapat dipahami melalui pengalaman indrawi. Ini mengacu pada pengertian yang berasal dari penggunaan kata-kata sehari-hari secara spontan, bukan hasil refleksi, sehingga terasa abstrak, umum, statis, dan konseptual. Penolakan melibatkan kontradiksi

terhadap konsep pengertian pertama (pengakuan), menghasilkan konsep pengertian kedua yang kosong, formal, tidak pasti, dan tidak terbatas.

Menurut Hegel, dalam konsep yang berikutnya, sebenarnya mengandung pengertian dari konsep sebelumnya. Konsep pemikiran berikutnya ini dijelaskan secara menyeluruh sehingga kehilangan kejelasan dan menjadi lebih abstrak. Kontradiksi dianggap sebagai dorongan utama dalam proses dialektika menuju penemuan kebenaran, sehingga harus memiliki kemampuan untuk memperkuat dan menilai ulang konsep-konsep yang bertentangan. Penggabungan kontradiksi menjadi sarana untuk menggabungkan dua konsep yang berlawanan agar menciptakan konsep yang lebih ideal.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kehadiran dialektika Agama dalam Komunikasi Politik? Mengapa dialektika Agama selalu muncul menjelang Pemilihan Presiden? Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas penting dosen dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan penelitian ilmiah yang didasarkan pada kajian isu dan fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat. Harapannya adalah menemukan pengetahuan baru yang dapat digunakan sebagai referensi dan memperkaya intelektual, terutama dalam literatur di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik swasta maupun negeri, serta di kalangan akademisi di mana pun penelitiannya dilakukan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pada prinsipnya, ide-ide dalam ilmu sosial bersifat konseptual, sehingga para ahli di bidang ini menganggapnya sebagai konstruk. Sebagai konstruk, ide-ide tersebut seringkali terlalu abstrak untuk langsung diamati dalam konteks penelitian empiris. Karena itu, diperlukan rencana untuk memungkinkan penyelidikan atau referensi empiris terhadap konstruksi tersebut. Langkah-langkah atau strategi semacam itu bisa dilakukan dalam satu tahap atau dua tahap, tergantung seberapa jauh hubungan antara konstruksi dan realitasnya. Apabila konsep tersebut berjarak jauh dari pengalaman empiris, maka diperlukan pendekatan strategis yang terdiri dari dua langkah: merumuskan definisi konseptual dan definisi operasional. Namun, jika konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian sudah cukup terkait dengan pengalaman empiris, maka cukup menggunakan definisi operasional.

Studi ini memanfaatkan metode wawancara mendalam (*indeept interview*) dan observasi lapangan (*field research*), tetapi juga melibatkan wawancara kelompok atau diskusi kelompok (*FGD*) terfokus. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam yang dianggap masih kurang dalam analisis dan kesimpulan yang dibuat.

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan narasumber, yaitu Pengurus Harian Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah Kota Bogor, di lokasi kantor mereka masing-masing. Pendekatan wawancara diterapkan melalui dua metode, yakni: 1) Wawancara bebas, di mana

pertanyaan dibebaskan kepada narasumber dan informan. 2) Wawancara terstruktur, di mana sejumlah pertanyaan telah disiapkan sebelumnya dalam daftar pertanyaan dan diajukan kepada narasumber dan informan.

Observasi lapangan dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif dengan tujuan untuk memahami konteks sosial-politik di mana individu pengurus atau kelompok berkumpul dan berinteraksi secara langsung. Dalam konteks ini, fokus observasi adalah lingkungan ekologis yang berpotensi memengaruhi perilaku pemilih. Oleh karena itu, pengetahuan peneliti akan lebih komprehensif dalam memahami perilaku pemilih, khususnya elemen pengurus harian NU dan Muhammadiyah Kota Bogor. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu yang bersangkutan, tetapi juga lingkungan di mana individu tersebut aktif.

Diketahui bahwa pengurus harian NU dan PD Muhammadiyah cenderung sangat religius, sehingga agama pasti memiliki dampak pada sikap dan perilaku mereka. Namun, tidak semua lingkungan tempat tinggal seseorang berada di wilayah dengan masyarakat yang sama-sama religius. Dengan memahami lingkungan ekologis yang memengaruhi perubahan sikap individu, seseorang dapat mendalami penyebab atau motivasi di balik pengaruh isu dan tema agama terhadap unsur pengurus harian organisasi tersebut. Ini mencakup analisis dampak dari interaksi agama dalam konteks komunikasi politik. Penyebab perubahan sikap dalam unsur pengurus organisasi yang terkait dengan faktor lingkungan yang memengaruhi individu menyebabkan perlunya memahami konsekuensi dari dialog tentang isu-isu agama dalam konteks komunikasi politik. Hal ini berdampak pada preferensi terhadap calon presiden dan dapat mengubah tingkat elektabilitas kandidat secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAAN

Agama adalah panduan dari Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Sebagai landasan bagi penganutnya, agama memberikan arahan dalam segala perilaku mereka. Sebagai sumber nilai dan etika, agama menuntut pengikutnya untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ada sebagai bentuk ibadah. Agama muncul dalam konteks masyarakat yang telah lama mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang mencerminkan kreasi, penciptaan, dan identitas mereka, tak peduli seberapa sederhana pun itu. Kebudayaan merangkum nilai, moralitas, dan perspektif hidup suatu komunitas. Ini meliputi beragam aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moralitas, hukum, dan tradisi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Agama di sini tidak harus dianggap sebagai dogma atau sistem moral yang berdiri sendiri, tetapi harus dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia. Karena pada dasarnya, agama bukanlah sekadar kumpulan nilai-nilai yang eksis untuk dirinya sendiri, melainkan agama menanamkan nilai-nilai

sosial bagi manusia. Sebagai hasilnya, agama merupakan salah satu komponen yang membentuk sistem nilai budaya. Agama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sistem moral dan etika sosial masyarakat. Nilai-nilai agama menjadi dasar bagi tindakan dan pola perilaku komunikasi manusia, serta nilai-nilai agama dapat diinterpretasikan menjadi nilai-nilai budaya yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. (Paisun, Jurnal El Harakat.2010).

### **1. Pandangan NU dan Muhammadiyah Kota Bogor**

Di dalam ruang masyarakat organisasi NU dan Muhammadiyah, pemahaman dialektika agama dalam komunikasi politik merupakan tema pembicaraan setiap waktu baik formil mau pun non formil. Bagi kedua organisasi ini membicarakan agama dalam komunikasi politik merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi keharusan bagi setiap pengurus dan pengikutnya. Dialektika agama dalam komunikasi politik bagi masyarakat NU dan Muhammadiyah sudah menjadi bahasan pokok dan ruh perjuangan dalam merawat kesatuan dan persatuan bangsa khususnya dikalangan para tokoh agama bagi salaf mau pun moderat. Khususnya warga organisasi NU dan warga Muhammadiyah Daerah Kota Bogor membicarakan agama dan politik di ruang publik sudah menjadi keharusan dan merupakan partisipasi dalam bernegara agar menjadikan pemilu presiden di tahun 2024 nanti dapat terlaksana sesuai rambu-rambu yang telah dibuat oleh penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, hubungan antara agama dan politik tidaklah satu arah. Artinya, tidak dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut sepenuhnya berdampak negatif atau positif terhadap demokrasi. Ada banyak variasi mengingat partai politik yang mengusung ideologi agama (terutama Islam) tidak konsisten dalam cara mereka menginterpretasikan dan menerapkan nilai-nilai Islam. Beberapa dari mereka berupaya untuk menonjolkan nilai-nilai substansial yang lebih menitikberatkan pada etika dan moral. Baik NU maupun Muhammadiyah secara seksama memiliki pandangan yang sama tentang penting dialektika agama di ruang komunikasi politik tentunya untuk tujuan memberikan pemahaman secara utuh kepada warganya masing-masing tentang perbedaan kewajiban terjun berpartisipasi ke dunia politik baik sebagai kontestan ataupun simpatisan dan politik identitas yang sering kali dimanfaatkan oleh segelintir politikus dan kelompok untuk menyerang kelompok lain demi memenangkan pertarungan secara mutlak dengan cara apapun. Identitas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari seorang aktor politik, karena telah menjadi bagian integral dari setiap individu.

Pada dasarnya, politik identitas bukanlah hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang politisi dalam konteks kampanye politik, karena identitas politik dan politik identitas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang melekat pada diri seorang politisi. Terutama jika seorang aktor politik memiliki latar belakang sebagai tokoh agama, maka memisahkan hal tersebut menjadi sulit. Oleh karena itu, organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah sepakat bahwa berpolitik tidak selalu harus

mengandalkan simbol agama atau menggunakan dalil agama sebagai alasan. Namun, NU dan Muhammadiyah menyarankan kepada siapa pun yang terlibat dalam dunia politik untuk tetap menjaga integritas agama dalam kampanye politik mereka, dan tidak mengorbankan nilai-nilai dan prinsip agama demi kepentingan politik semata. Mereka menegaskan bahwa agama tidak menghalangi umatnya untuk terlibat dalam politik, sebaliknya, agama mendorong umat untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan politik demi menciptakan negara yang berlandaskan prinsip keadilan dan kasih sayang Allah.

Kalaupun pada kenyataannya sebagian yang ada pula yang menggunakan simbol-simbol formal keagamaan, seperti: penerapan syariat Islam, wisata halal, dan konsep syariah dalam dunia perbankan. Untuk perbandingan, di Amerika Serikat, agama memiliki dampak pada demokrasi. Sementara di Italia, agama Katolik memiliki korelasi yang kurang positif dengan demokrasi. (Alexis De Toeqouville, 2007) Pada kenyataannya, agama sering kali menjadi bagian dari berbagai kegiatan kampanye dan komunikasi politik, seringkali dimanfaatkan untuk berbagai tujuan politik, termasuk untuk mendapatkan dukungan dari segmen tertentu dalam masyarakat berdasarkan wilayah geografisnya. Di dunia Barat, terutama di Amerika Serikat yang dikenal dengan sistem demokrasi liberalnya, agama tetap menjadi faktor yang hadir dan dipertimbangkan dalam dinamika politik dan kampanye. Meskipun Amerika secara resmi merupakan negara sekuler, penduduknya dikenal sangat religius. Menurut Chapp, penggunaan retorika agama dalam politik Amerika sudah menjadi hal umum, dan menurutnya, elit politik Amerika sudah terbiasa memanfaatkan agama dalam pemilihan umum serta dalam berbagai aspek penting dari politik negara. Ini menunjukkan bahwa agama memiliki peranan yang signifikan dalam politik Amerika, bahkan turut membentuk politik Amerika. (Cristhoper B Chapp, Ithaca Press 2012). Komunikasi politik merupakan proses komunikasi yang berdampak pada keadaan politik, baik yang terjadi saat ini maupun yang mungkin terjadi di masa depan, yang mengarah pada tindakan manusia dalam situasi konflik atau persaingan. Komunikasi politik berkaitan dengan pembuatan, penyebaran, pengolahan, dan dampak informasi, baik melalui media maupun interaksi antarindividu dalam konteks politik.

## **2. Politik Identitas Sebuah alat Komunikasi Politik**

Di Indonesia, politisi yang sering kali menggunakan atau mengidentifikasi diri dengan atribut dan simbol agama sering dijuluki sebagai politisi identitas. Istilah ini telah dikenal selama 20 tahun terakhir, khususnya setelah periode reformasi hingga saat ini. Beberapa pengamat politik di Indonesia menafsirkan politik identitas sebagai kegiatan politik yang berasal dari identitas individu, termasuk dari segi etnis, ras, suku, atau agama. Definisi lainnya menggambarkan politik identitas sebagai strategi politik yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang sejenisnya, untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah lain, identitas di politisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras,

etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Politik identitas umumnya bermula dari kelompok sosial yang merasa tertekan atau didiskriminasi oleh negara dan pemerintah dalam mengatur sistem pemerintahan. Definisi alternatifnya, politik identitas merupakan bentuk aktivitas politik yang dianalisis secara teoritis berdasarkan pengalaman-pengalaman kesamaan dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok tertentu.

Namun, bagi segenap pengurus NU dan Muhammadiyah kota Bogor membicarakan agama dalam komunikasi politik bukanlah kategori politik identitas melainkan kewajiban yang melekat dalam diri setiap orang muslim, karena berpolitik sesuai aturan agamanya merupakan ibadah yang sudah banyak di contohkan para ulama dalam berbagai sejarah. Jadi Sedangkan pemahaman peneliti, demokrasi indonesia sepertinya tidak jauh berbeda dengan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat, dimana kekuatan agama selalu digunakan untuk meraih simpati pemilih berbasis religius yang berperan penting dalam menentukan suara di setiap helatan pemilu presiden. Dalam setiap memasuki tahun pemilu, tokoh Agama selalu menjadi sorotan penting dalam pembicaraan bagi para politikus, dan semakin ramai tema-tema dialektika agama yang dikaitkan negara di ruang diskusi publik. Bahkan bagi sebagian pemilih fanatik bisa saja mengatakan bahwa memilih sosok presiden harus sesuai agama yang dianutnya, bahkan harus seiman dan seagama sesuai keyakinannya.

### **3. Pendekatan Teori Penelitian**

Dalam bukunya "The Study of Religions and Primitive Religions", W. Richard Comstock mengungkapkan bahwa para ahli menggunakan lima metode untuk memahami Agama. Kesadaran akan signifikansi agama telah mendorong ilmuwan dari berbagai bidang untuk melakukan studi yang mendalam terhadap fenomena agama. Pendekatan awal ini melibatkan psikolog terkemuka seperti Sigmund Freud (1856-1939) dan Carl Gustav Jung (1875-1961), yang berusaha memahami motivasi di balik agama. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa motivasi beragama dapat timbul sebagai akumulasi dari pengalaman-pengalaman psikologis yang dialami seseorang.

### **4. Bagaimana Agama selalu hadir dalam dialektika Komunikasi Politik?**

Agama memiliki kekuatan komunikasi yang mampu meyakinkan dan mengatasi tantangan. Namun, jelas bahwa agama saja tidak cukup untuk meningkatkan popularitas seorang kandidat. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan agama dengan strategi komunikasi politik yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pesan yang ingin disampaikan tentang tujuan untuk meningkatkan mayoritasnya adalah untuk kalangan awam yang masih terbuka terhadap pengaruh isu-isu agama. Meskipun kita hidup dalam era negara demokratis, peran agama masih sangat penting. Sebagai sumber inspirasi, agama seharusnya dapat membawa kedamaian dalam ruang publik dengan memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat yang demokratis dan pasca sekuler, penting untuk mengakui nilai dari argumen yang bersifat religius. Jurgen Habermas,

misalnya, menekankan pentingnya agama dan meyakini bahwa agama memegang peran kunci dalam menciptakan kedamaian. Dia merekomendasikan agar agama dianggap sebagai aspek yang signifikan dalam konteks negara demokratis.

Oleh karena itu, wajar jika dalam masyarakat pasca sekulerisme, agama hadir di ruang publik sebagai sumber pemikiran tentang peradaban. Metode-metode yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk memahami agama pada dasarnya bertujuan untuk melihat agama sebagai fenomena sosial yang bukan semata berasal dari Tuhan untuk diterapkan oleh manusia. Jika dilihat dari perspektif agama itu sendiri, akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Dalam agama, ditegaskan bahwa agama adalah serangkaian aturan ketuhanan yang mendorong manusia untuk menggunakan akal pikiran mereka (untuk mempertimbangkan eksistensinya dan hubungannya dengan Tuhan) serta kebebasan individu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang mencakup keyakinan dan tindakan dalam menjalani kehidupan. Agama memiliki dua peran, yakni: pertama, sebagai penjelas tentang hal-hal di luar jangkauan manusia yang dapat menimbulkan rasa kekurangan dan kekecewaan yang berarti. Selain itu, agama mengajarkan pemahaman tentang pandangan dunia yang pada akhirnya membentuk semangat kerja sebagai implementasi dari imbalan ideal yang mungkin diterima orang lain ketika berada di dunia setelah kebangkitan. Kedua, agama berfungsi sebagai sarana ritual yang memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan hal-hal di luar cakupannya. Hubungan ini berkembang dari perpaduan dua perasaan yang pada dasarnya saling bertentangan, tetapi kemudian melebur dalam diri manusia. Dua perasaan yang bertentangan tersebut adalah ketakutan dan kerinduan. Bukankah konsep tentang Yang Maha Sempurna itu sendiri merupakan sebuah paradoks? Hal ini tercermin dalam atribut keutamaan Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna, yang menunjukkan bahwa Allah adalah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Nyata dan Yang Tersembunyi.

Agama selalu senantiasa hadir dalam ruang komunikasi politik mana kala pembicaraan di ruang publik tidak dibatasi dalam membahas identitas keyakinan seseorang ketika ia memutuskan untuk terjun menjadi bagian dari aktor politik. Jikalau politisi itu berlatar belakang tokoh agama tentu selalu melekat dalam pribadinya. Akan tetapi pandangan berbeda pengurus NU dan Muhammadiyah Kota Bogor bagaimana dialektika agama selalu hadir di ruang komunikasi politik karena setiap aktor politik pastinya selalu identik dengan keyakinannya dalam meyakinkan konstituennya untuk memilihkan dalam perhelatan pemilu presiden tahun 2024. Dasar keyakinan yang dimiliki oleh setiap aktor politik tidak pernah lepas dari keyakinannya atas kepercayaan terhadap agamanya. Maka, selama aktor politik di Indonesia masih memiliki keyakinan terhadap salah satu agama yang diakui oleh negara, maka pembahasan dan perbincangan agama di ruang komunikasi politik pasti terus menjadi tema yang menarik untuk dikaji oleh para peneliti.

## **5. Kenapa dialektika Agama selalu muncul menjelang pesta Demokrasi pilpres?**

Di Indonesia, seringkali politisasi agama dan pengangkatan politik ke ranah yang sakral sulit dibedakan; keduanya sering dianggap serupa sehingga orang sulit membedakan dampak yang dihasilkannya. Hubungan antara agama dan politik seringkali dilihat secara samar. Bagi sebagian orang, fenomena ini dianggap wajar karena politik dianggap perlu terkait dengan nilai-nilai dan etika agama. Karakteristik yang membedakan masyarakat Indonesia adalah kesetiaan mereka pada agama yang mereka anut, sehingga sulit untuk mengabaikan peran agama dalam politik praktis. Orang-orang yang memisahkan agama dari politik dianggap melukai umat beragama dan dituduh menyebarkan pemahaman sekuler, meskipun sebenarnya demokrasi menekankan nilai keterbukaan sementara agama cenderung eksklusif, lebih tertutup untuk kelompoknya sendiri. Karena tidak ada perbedaan yang jelas antara pengangkatan politik dan politisasi agama, setiap bentuk interaksi antara agama dan politik sering dianggap sebagai politisasi agama yang berpotensi berbahaya karena dapat memicu isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan bahkan memicu konflik antar-umat beragama. Pertanyaan tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena selalu timbul pada setiap putaran pemilihan umum lima tahunan! Jika diteliti secara cermat dan mendalam, kemudian dikaitkan dengan sejarah partai politik di Indonesia, akan terlihat bahwa partai politik di Indonesia selalu memiliki keterkaitan dengan agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, terlihat jelas bahwa perkembangan demokrasi Indonesia tidak pernah sepenuhnya terlepas dari pengaruh agama. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus menjelaskan apakah hubungan antara agama dan politik berdampak positif atau negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Apakah ada korelasi positif atau negatif antara agama dan demokrasi? Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas untuk mencari jawaban konkret mengenai hubungan antara dialog agama yang sering muncul dalam ruang komunikasi politik, terutama menjelang pemilihan presiden pada tahun 2024. Mungkinkah pengaruh magnet agama begitu kuat ketika dibicarakan di ruang publik khususnya komunikasi politik, kenapa tema agama selalu seksi di bahas di ruang komunikasi politik, atukah agama menjadi tolok ukur kemenangan salah satu kandidat calon presiden di setiap pemilu 5 tahunan? Masih banyak lagi pertanyaan yang hadir dalam pikiran rakyat Indonesia, kenapa agama selalu menjadi menarik dan seksi dibicarakan oleh para kandidat capres menjelang pesta demokrasi pemilu presiden. Yang menarik dibahas di sini adalah bagaimana pandangan pengurus NU dan Muhammadiyah Kota Bogor terkait dialektika agama dalam komunikasi politik khususnya menjelang pemilu presiden tahun 2024.

Bagi sebagian pengurus NU Kota Bogor tema agama yang sering dibicarakan dalam ruang komunikasi politik menjelang pemilu presiden sudah menjadi hal biasa namun penting untuk di simak kenapa, karena basis pemilih religius masih menjadi magnet kuat dalam setiap perhelatan pemilu presiden. Namun, kalau dilihat secara mendalam tema agama terlalu sensitif untuk diangkat dalam dialog antar aktor politik apalagi dimasukkan ke ranah komunikasi politik. Kata agama ketika dimasukkan ke dalam

ruang-ruang diskusi komunikasi politik selalu terbentuk dua paradigma positif dan negatif, bahkan sebagian aktor politik terkadang hanya memanfaatkan tema agama sebagai ceruk untuk mendulang banyak suara demi meraih kemenangan di basis pemilih religius. Sering munculnya dialektika agama dalam komunikasi politik di setiap menjelang pesta demokrasi pilpres di Indonesia menandakan bahwa politisasi agama begitu mudah dilakukan oleh para politikus partai di negara Indonesia. Dalam pandangan pengurus NU dan Muhammadiyah Kota Bogor, hal tersebut bisa menjadi ciri khas dinamika perpolitikan di Indonesia yang cenderung identik dengan tema agama dan politik identitas.

Komitmen organisasi NU dan Muhammadiyah terus mengawal demokrasi Indonesia yang berkeadaban dan santun dalam kompetisi, siap menang, siap kalah hanya untuk persatuan Indonesia di masa depan. Merawat demokrasi plural dan heterogen yang sudah menjadi wajah politik demokrasi Indonesia merupakan keharusan dan kewajiban bagi elemen pengurus Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di seluruh penjuru Indonesia. *Islam nusantara* yang sudah menjadi *tagline* Nahdhatul Ulama selalu menjadi warna tersendiri dalam wajah politik demokrasi Indonesia, dikuatkan lagi dengan moderasi beragama yang semakin familiar dikalangan tokoh agama semakin mendorong kuat persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman dalam menghadapi tantangan dan budaya asing yang berpotensi merusak keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan konsistensi gerakan Islam berkemajuan yang selalu digaungkan Muhammadiyah menjadi ciri khas kekayaan intelektual yang dimiliki organisasi Muhammadiyah dalam mewarnai wajah demokrasi Indonesia. Islam berkemajuan senantiasa mendorong roda perpolitikan demokrasi Indonesia menuju kedewasaan dalam berkompetisi di ruang politik, lebih mengedepankan gagasan ide dan cita-cita besar untuk merawat keutuhan bangsa Indonesia agar tercapai Indonesia emas ditahun 2045 nanti. Sumbangsih pemikiran dan ide gagasan besar para tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap bangsa ini sudah tidak bisa diragukan lagi bahkan tanpa kehadiran kedua organisasi besar tersebut sepertinya bangsa ini tidak pernah terwujud dan mungkin tidak pernah ada.

## KESIMPULAN

### SIMPULAN

Dialektika agama dalam komunikasi politik bagi masyarakat NU dan Muhammadiyah sudah menjadi bahasan pokok dan ruh perjuangan dalam merawat kesatuan dan persatuan bangsa khususnya dikalangan para tokoh agama bagi salaf mau pun moderat.

Dialektika agama dalam ruang komunikasi politik menjelang pemilu presiden tahun 2024 merupakan upaya umat Islam dalam menjaga sekaligus mengawal pesta demokrasi lima tahunan berjalan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama, yaitu jujur dan adil, siap menang, dan siap kalah.

Sering munculnya dialektika agama dalam komunikasi politik di setiap menjelang pesta demokrasi pilpres di Indonesia menandakan bahwa politisasi agama begitu mudah dilakukan oleh para politikus partai di negara Indonesia. Dalam pandangan pengurus NU dan Muhammadiyah Kota Bogor, hal tersebut bisa menjadi ciri khas dinamika perpolitikan di Indonesia yang cenderung identik dengan tema agama dan politik identitas.

## SARAN

Peneliti berharap ke depan hasil kajian ini bisa tindaklanjuti dengan riset-riset lain yang lebih mendalam terkait dialektika agama dan komunikasi politik. Penelitian dengan sudut pandang berbeda diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan komunikasi dan penyiaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexis De Toeqouville. 2007. "Democracy in America", dalam Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Asghar Ali Engineer. 1999. *Islam Dan Teologi Pembebasan*, trans. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
- Bryan S. Turner. 2008. *Religion and Modern Society; Citizenship, Secularisation and the State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hal. 149–52; Abdullah An-Na'im, *Islamic and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia* (Cambridge: Mass.: Harvard University Press)
- Cristhoper B Chapp. 2012. *Religious Rethoric and American Politic The Endurance of Civil Religion in Electoral Campaign* (Ithaca, Cornel University Press)
- Ebrahim Moosa. 2009. *Islam and Modernity: Key Issues and Debates* (Edinburgh: Edinburgh University Press), John L. Esposito. 2016. *Islam and Politics* (New York: Syracuse University Press, 1998), 29– 32; Iza R. Hussin, *The Politics of Islamic Law; Local Elites, Colonial Authority, and the Making the Muslim State* (USA: The University of Chicago Press)
- M. Din Syamsuddin. 2001. *Islam Dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos)

## JURNAL

- Ahmad Sadzali. 2020. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi," Undang: Jurnal Hukum 3, no. 2 (December 1). <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>
- Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni. 2019. "HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,"

- Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (May 29) <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Athoillah Islamy. 2019. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 30): 162–63, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059>.
- Burhanuddin Muhtadi. 2021. "SURVEI NASIONAL SUARA ANAK MUDA TENTANG ISU-ISU SOSIAL POLITIK BANGSA" (Jakarta, March 21), [https://indikator.co.id/wpcontent/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator\\_21-Maret-2021.pdf](https://indikator.co.id/wpcontent/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator_21-Maret-2021.pdf)
- Hamdan. 2017. *DIALEKTIKA WACANA ISLAM DAN POLITIK*. MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 1, April
- Lembaga Survei Indonesia-Akurat, Terpercaya, Berpengaruh," accessed August 27, 2021, <http://www.lsi.or.id/riset/447/rilis-survei-lsi-03-november-2019>
- Muhamad Ridwan Effendi and Iqbal Syafrudin. 2020. "Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 02 (April 2). <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14528>
- Muhamad Ridwan Effendi and Iqbal Syafrudin. 2020. "Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 02 (April 2) 12–27, <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14528>
- Ngainun Naim and Qomarul Huda. 2021. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (May 25): 42, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2253>.
- Paisun. 2010. "Dinamika Islam Kultural: Dialektika Islam dan Budaya Madura" dalam *Jurnal El Harakat*, Vol. 12 No. 2 edisi Juli – Desember) 160
- Sudirman. 2020. "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Pandangan Islam Kontemporer," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (May 29).
- Sunaryo. 2020. "Meninjau Kembali Hubungan Agama dan Politik dalam Kerangka Demokrasi dan Keadilan," *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 18, no. 2 (December 27) <https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i2.2032>